SKRIPSI

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN BUDAYA RIMPU MPIDA DI KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN 2019

(Study Kasus Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima Tahun 2019)

OLEH

DIAN LOROSAE
NIM: 21513A0035

KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI STUDI PEMERINTAHAN
JURUSAN ILMU SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM
2019

SKRIPSI

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN BUDAYA RIMPU MPIDA DI KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN 2019

(Study Kasus Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima Tahun 2019)

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)

Program Study Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

OLEH

DIAN LOROSAE
NIM: 21513A0035

KONSENTRASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI STUDI PEMERINTAHAN
JURUSAN ILMU SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

UPAYA PEMERINTAH DALAM MELESTARIKAN BUDAYA RIMPU MPIDA DI KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN 2019

(Study Kasus Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bima Tahun 2019)

Disusun dan diajukan oleh:

DIAN LOROSAE
NIM. 21513A0035

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujuiuntuk diuji dalam sidang skripsi

Mataram, 13 Mei 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs.H.Abdurrahman,MM	**M.Awaluddin,S.AP.M.SI**
NIDN.08004116101	**NIDN.**

Mengetahui.
Ketua Program Studi
StudiPemerintahan

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

UPAYA PEMERINTAH DALAM MELESTARIKAN BUDAYA RIMPU MPIDA DI KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN 2019
(Study Kasus Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bima Tahun 2019)

Disusun dan diajukan oleh

DIAN LOROSAE
NIM. 21513A0035

PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 22 Mei 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

1.Drs.H.Abdurrahman,MM **NIDN.08004116101**	**Ketua**	(.....)
2.M.Awaluddin,S.AP,M.SI **NIDN.**	**Anggota 1**	(.....)
3.Yudhi Lestanata,S.IP,M.IP **NIDN.082711880**	**Anggota II**	(.....)

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Drs. Amil,.M.M
NIDN. 0831126204

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun perguruan tinggi yan lain.
2. Karya tulis saya ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain walaupun ada cukup sebagai referensi, kecuali secara teknis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran serta kepuasan dalam penyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, serta lainnya sesuai dengan Norma yang berlaku di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Mataram, 22 Mei 2019
Yang membuat pernyataan

DIAN LOROSAE
NIM. 21513A0035

MOTO

“BERLAYAR MENUJU PANTAI HARAPAN”

(Yang Memisahkan Perahu Dengan Pantai Harapan Adalah Badai Topan, Gelombang Dan Batu Karang. Yang Memisahkan Anda Dengan Keberhasilan Adalah Masalah Yang Menantang. Disitulah Tanda Kesejatian Teruji. Hakekatnya Perahu Berlayar Menembus Segala Rintangan, Hakekatnya Diri Anda Adalah Berkarya Menemukan Kebahagiaan)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua, yang sangat saya cintai dan hormaati.
2. Keluarga Besar, yang selalu mendoakan dan membantu baik secara material ataupun non material.
3. Sahabat-sahabat yang ikut mensuport hingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.

Persembahan ini sebagai tanda Terima Kasih saya ucapan untuk Doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan semangatnya yang selama ini selalu diberikan kepada saya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada hadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat anugrahnya dan kasih sayang yang begitu besar sehingga penulisi dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **"UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN BUDAYA RIMPU MPIDA DI KECEMATAN SAPE KABUPATEN BIMA TAHUN 2018"**

Skripsi ini merupakan kewajiaban yang harus di selesaikan oleh seluruh mahasiswa Universitas Muhammadyah Mataram khususnya program Studi Ilmu Pemerintahan dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadyah Mataram.

Dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini peneliti tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang telah memberi dorongan, bimbingan dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M. IP Selaku Rektor Universitas Muhammadyah Mataram.
2. Bapak Drs. H. Mohammad Junaidi, M.M Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dedi Iswanto Selaku wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali. M.SI Selaku wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Ayatullah Hadi, S. IP., M.IP Selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan.
6. Bapak Drs.H.Abdurrahman.,M.M Selaku Dosen pembimbing I yang telah melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

7. Bapak M. Awaluddin, S.AP., M.Si Selaku Dosen pembimbing II yang telah melakukan pendampingan dalam proses pengerjaan Skripsi ini.
8. Semua kaprodi dan dosen yang telah mendidik penulis dari Semester awal hingga akhir.
9. Kedua orang tuaku yang selalu saya banggakan Bapak dan Ibu serta kakak dan adek-adek yang selalu menjadi motivator utama dan selalu mendoakan, memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skipsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna baik bagi segi sisi maupun penulisan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifar konstruktif dengan ikhlas dari semua pihak demi menyempurnakan selanjutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khusunya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Mataram, 23 Agustus 2019
Penyusun

DIAN LOROSAE
21513A0035

ABSTRAK

Nama : Dian Lorosae
Nim : 21513A0035

Judul : Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Budaya *Rimpu Mpida* di Kecamatan Sape Kabupaten Bima (Studi Kasus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018)

Busana *rimpu mpida* yang menjadi salah satu budaya berbusana suku *Mbojo* sekarang hampir punah, hal itu di sebabkan karena masyarakat Bima, sudah jarang menggunakan *rimpu mpida* untuk menutup aurat, hal itu disebabkan sudah banyak busana menutup aurat yang lebih bermoderen yang bermunculan. Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah yaitu Bagaimanakah upaya pemerintah daerah dalam melestarikan budaya *rimpu mpida* di Kecamatan Sape Kabupaten Bima dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam melestarikan budaya *rimpu mpida* di Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Hasil penelitian yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa upaya pemerintah daerah dalam melestarikan budaya *rimpu mpida* di Kecamatan Sape Kabupaten Bima yaitu sudah berjalan optimal, seperti memfasilitasi berbagai macam kegiatan budaya *rimpu mpida*, mencakup tentang tujuan pelestarian, sosialisas. Faktor pendukung pemerintah daerah dalam melestarikan budaya *rimpu mpida* di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, adanya aturan yang mengatur tentang pelestarian budaya di Kabupaten Bima seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 66 ayat 2 tentang pemerintah daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Sementara factor penghambat adalah munculnya arus globalisasi yang menimbulkan pengaruh negative oleh pelakunya.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah dan Budaya *Rimpu Mpida*

ABSTRACT

Name : Dian Lorosae
Nim : 21513A0035
Title : Efforts of Local Governments to Preserve Rimpu Mpida Culture in Sape Subdistrict, Bima Regency (Case Study in the Culture Education Office in 2018)

The rimpu mpida clothing, which is one of the cultures dressed by the Mbojo tribe, is now almost extinct, because it is because the Bima community has rarely used the rimpu mpida to cover their genitals, this is due to the fact that many clothes cover more modern genitals that have sprung up. Based on the background, the researcher formulated the problem, namely what is the local government's efforts to preserve the culture of the rimpu mpida in Sape Subdistrict, Bima Regency and what are the supporting factors and constraints for the regional government in preserving the rimpu mpida culture in Sape District, Bima Regency.

The results of the research carried out, it can be concluded that the efforts of the local government in preserving the culture of rimpu mpida in Sape Subdistrict, Bima Regency, have been running optimally, such as facilitating various cultural activities of the rimpu mpida, including the purpose of conservation, socialization. Factors supporting the regional government in preserving the culture of the rimpu mpida in Sape District, Kabupaten Bima, there are rules governing cultural preservation in Kabupaten Bima such as Law Number 22 of 1999 article 66 paragraph 2 concerning regional government and Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government. While the inhibiting factor is the emergence of globalization flows that cause negative influence by the perpetrators.

Keywords: Rimpu Mpida Regional Government and Culture

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**

ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah **1**

1.2.Rumusan Masalah **6**

1.3.Tujuan Penelitian **6**

1.4.Manfaat Penelitian **6**

BAB II. LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Relevan **8**

2.2 Konsep Arus Globalisasi **16**

2.3 Konsep Kebijakan **17**

2.4 Upaya Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Budaya **26**

2.5 Konsep Kebudayaan **29**

2.6 Konsep *Rimpu MPida* **33**

2.7 Kerangka Pikir **34**

2.8 Definisi konseptual **36**

2.9 Definisi Operasional **37**

2.10 Fokus Penelitian **38**

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode yang digunakan **39**

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian **40**

3.3 Jenis Dan Sumber Data **41**

3.4 Informan Penelitian **43**

3.5 Teknik Pengumpulan Data **44**

3.6 Teknik Analisis Data **45**

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data **47**

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian **49**

4.1.1 Gambaran Umum Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bima **49**

4.1.2 Profil Kecamatan Sape **57**

4.1.3 Pembahasan 60

4.1.4 Upaya Pemerintah Daerah dalam Melestarikan Budaya *Rimpu Mpida* di Kecamatan Sape Kabupaten Bima 60

4.1.5 Faktor Pendukung dan Penghambat pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Budaya *Rimpu Mpida* di Kecamatan Sape Kabupaten Bima **.....82**

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... ..109

5.2 Saran.....**109**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

DAFTAR TABEL

2.1. Penelitian terdahulu …….....8

2. 7. Tabel kerangka berfikir …….....36

4.1.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bima ….....58

4.1.2. Luas Wilayah Kec. Sape ……...….....60

4.1.3 Jumlah Pendudukan Kec. Sape Per Desa ……..... 60

4.2.2. Tujuan Pelestarian Budaya Rimpu Mpida Kab. Bima Tahun 2019 ….....70

4.2.4. Jumlah Desa Yang Di Sosialisasikan Pada Tahun 2017-2018 …….....77

4.3.2. Jumlah Fasilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bima Tahun 2019.....93

4.1.1. Rencana Anggaran Belanja Penyelenggaraan Kgiatan Budaya Rimpu Mpida…….99

4.4.3. Bukti Nyata Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Rimpu Mpida……...106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun temurun sejak dulu, akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya. Dimana sifat lokal tersebut padd akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakatnya (Yoeti, 2005).

Nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada biasanya masih dipertahankan oleh masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang masih mentradisi dalam masyarakat juga disebabkan karena kebudayaan yang ada biasanya bersifat universal sehingga kebudayaan tersebut telah melekat pada masyarakat dan sudah mejadi hal yang pokok dalam kehidupannya. Kebudayaan merupakan sesuatu yang bersifat *superorganic*, karena kebudayaan bersifat turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, walaupun manusia yang ada di dalam masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran (Soekanto, 2007).

Dengan demikian bahwa kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adanya kaitan yang begitu besar antara kebudayaan dan masyarakat menjadikan kebudayaan

sebagai suatu hal yang sangat penting bagi manusia dimana masyarakat tidak dapat meninggalkan budaya yang sudah dimilikinya.

Kebudayaan nasional merupakan sesuatu hal yang penting bagi Indonesia dan merupakan salah satu unsure dalam menjaga rasa nasionalisme dalam diri kita sebagai rakyat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia serta penjelasannya antara lain menyatakan usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia" (Ihromi, 2004).

Beranjak dari amanat itu, pemerintah berkewajiban untuk mengambil segala langkah dan upaya dalam usaha memajukan kebudayaan bangsa dan negara agar tidak punah dan luntur karena merupakan unsur nasionalisme dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan negara kita. Benda cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggan nasional serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk melestarikan benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

Wujud hasil dari suatu kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun tersebut biasanya dapat berbentuk benda cagar budaya. Sebagian besar benda cagar budaya suatu bangsa adalah hasil cipta budaya bangsa itu

pada masa lalu yang dapat menjadi sumber kebanggaan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlindungan benda cagar budaya Indonesia merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggan nasional dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila. Kesadaran jati diri suatu bangsa yang banyak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang masa lalu bangsa yang bersangkutan, sehingga keberadaan kebangsaan itu pada masa kini dan proyeksinya ke masa depan bertahan kepada ciri khasnya sebagai bangsa yang tetap berpijak pada landasan falsafah dan budayanya sendiri (Koentjaraningrat, 2010).

Upaya pelestarian benda cagar budaya dilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkokoh kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional. Memperhatikan hal-hal tersebut, pemerintah dianggap perlu dan berkewajiban untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap cagar budaya yang ada di Indonesia berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

Pelestarian kebudayaan pada dasarnya bukan semata-mata menjadi kepentingan dan tanggungjawab pemerintah, namun juga kewajiban semua lapisan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dan para anggota atau pelaku seni mutlak diperlukan dalam upaya pelestarian seni budaya. Pemerintah juga perlu memberikan kebebasan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam

mengembangkan seni budaya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat. Beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya yaitu melakukan pentas kebudayaan, pendataan, inventarisasi, dan pendokumentasian beragam seni budaya yang terdapat di setiap daerah, khususnya di Kecamatan Sape Kabupaten Bima (Hasil Analisis Peneliti, 2018).

Adanya perhatian dari berbagai pihak mengenai pelestarian kebudayaan khususnya kesenian tradisional, diharapkan bisa menjadikan kebudayaan semakin berkembang, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus tetap berusaha melestarikan kebudayaan yang bersumber pada seni tradisional yang terdapat di seluruh pelosok Indonesia. (Yoeti, 2005).

Kabupaten Bima adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki berbagai macam kebudayaan. Salah satunya adalah *Rimpu mpida*. *Rimpu mpida* merupakan busana adat harian tradisional yang berkembang pada masa kesultanan, sebagai identitas bagi wanita muslim di Bima. *Rimpu mpida* adalah memakai sarung dengan melingkarkannya pada kepala dimana yang terlihat hanya wajah dengan menggunakan sarung. kebudayaan *Rimpu mpida* yang merupakan salah satu hasil kebudayaan masyarakat Bima (Malingi, 2013).

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 12 November 2018 pada masyarakat Kecamatan Sape Kabupaten Bima, bahwa sebagaian besar masyarakat masih berusaha untuk tetap melestarikan kebudayaan, salah satunya adalah *rimpu mpida,* walaupun harus berjuang menghadapi

kebudayaan yang berasal dari luar, seperti menggunakan pakaian sedikit terbuka (seksi). Adanya budaya *rimpu mpida* yang masih eksis di antara budaya modern ini, peneliti tergerak untuk melakukan penelitian lebih lanjut di daerah tersebut terkait dengan sejarah dari kesenian budaya *rimpu mpida*, serta beberapa upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Sape Kabupaten Bima dalam melestarikan kesenian Kenanthi di era modernisasi seperti sekarang (Hasil Observasi Peneliti, 2018).

Busana *rimpu mpida* yang menjadi salah satu budaya berbusana suku *Mbojo* sekarang hampir punah, hal itu di sebabkan karena masyarakat Bima, sudah jarang menggunakan *rimpu mpida* untuk menutup aurat, hal itu disebabkan sudah banyak busana menutup aurat yang lebih bermoderen yang bermunculan. Ibu-ibu yang sudah menikah atau berkeluarga yang dulunya selalu menggunakan *rimpu mpida* untuk berbusana menutup aurat sekarang sudah banyak yang beralih menggunakan jilbab. Karena apabila memakai *rimpu mpida*, para perempuan yang masih gadis itu merasa malu sehingga mereka lebih menggunakan jilbab untuk menutup auratnya ketimbang menggunakan *rimpu mpida* yang menjadi budaya berbusana suku Bima. Selain itu, masyarakat Bima mulai terkontaminasi dengan budaya barat seperti menggunakan pakaian seksi dan meninggalkan pakaian tradisional *rimpu mpida* di Kabupaten Bima (Hasil Observasi Peneliti, 2018).

Berdasarkan latar belakang maslaha di atas peneliti tertarik meneliti tentang judul Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Budaya *Rimpu*

mpida di Kecamatan Sape Kabupaten Bima (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kebudayaan Tahun 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah upaya pemerintah daerah dalam melestarikan budaya *rimpu mpida* di Kecamatan Sape Kabupaten Bima?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam melestarikan budaya *rimpu mpida* di Kecamatan Sape Kabupaten Bima?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam melestarikan budaya *rimpu mpida* di Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam melestarikan budaya *rimpu mpida* di Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi teoretis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Peneliti ini diharapkan akan dapat memberi pemahaman, pengetahuan, dan gambaran utuh tentang upaya pemerintah daerah dalam melestarikan budaya *rimpu mpida*.

2. Dengan adanya penelitian akan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan institusi pendidikan pada umumnya tentang upaya pemerintah daerah dalam melestarikan budaya *rimpu mpida*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah, sebagai masukan untuk merumuskan kebijakan terutama mengenai upaya pemerintah daerah dalam melestarikan budaya *rimpu mpida*.
2. Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengenal tentang upaya pemerintah daerah dalam melestarikan budaya *rimpu mpida*.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap studi karya-karya terdahulu yang berdekatan atau berkaitan topiknya dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk menghindari duplikasi, plagiasi, menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti bahwa penelitian dianggap terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Ikamonika, *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional di Kota Makassar*.

Nama	Ikamonika
Judul	*Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional di Kota Makassar*
Variabel	Variabel bebas (*independentt*) adalah kebijakan pemerintah daerah
	Variabel tergantung adalah pelestarian kesenian tradisional di Kota Makassar.
Metode Penelitian	Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif

Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh adapun kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di Kota Makassar adalah: (1) Melaksanakan pembinaan kelompok kesenian; (2) Menjadi fasilitator sarana/prasarana kepada kelompok seni dalam kegiatan pertunjukan seni tradisional; (3) menjadi mediator kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata untuk mendapatkan bantuan dana dari instansi swasta; (4) bekerja sama dengan kelompok seni di Kota Makassar ; (5) mengadakan acara rutin pagelaran seni tradisional. Faktor pendukung pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional di Kota Makassar adalah: (1) pemerintah ; (2) masyarakat. faktor penghambat dalam pelaksanaan kesenian tradisional adalah: (1) Modernisasi ;(2) kurangnya minat remaja mempelajari kesenian tradisional;(3) media massa kurang memuat informasi dan tayangan tentang kesenian tradisional; (4) perubahan sosial;(5) para pelaku seni tradisional yang kurang kreatif dan inovatif.
Perbedaan	Perbedaan dengan penelitian yaitu pada tujuan penelitian, dimana peneliti lebih mengkaji tentang upaya dan faktor penghambat pemerintah daerah dalam melestarikan budaya
Persamaan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dan berkaitan dengan pemerintah daerah.

Tabel 2. Ahmad *Yulisar*, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Nilai-nilai Lokal Masyarakat Adat Amma Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.*

Nama	Ahmad Yulisar
Judul	*Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Nilai-nilai Lokal Masyarakat Adat Amma Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulu kumba*

Variabel Penelitian	Variabel bebas (*independentt*) adalah peran pemerintah daerah. Sedangkan
	Variabel tergantung adalah pelestarian nilai-nilai lokal masyarakat adat *Amma Toa* Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
Metode Penelitian	Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Amma Toa Kajang tengah mengalami degradasi nilai *Pasang ri Kajang* yang terutama diakibatkan oleh arus kencang modernisasi yang perlahan namun pasti mulai memasuki kehidupan masyarakat adat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba mengambil peran sebagai pelindung kebudayaan lokal melalui usulan rancangan peraturan daerah tentang pengukuhan dan perlindungan masyarakat hukum adat Amma Toa Kajang meski sampai dirampungkannya skripsi pada desember 2014 ini, peraturan daerah tersebut belum disahkan. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba bekerjasama dengan lembaga internasional yang membidangi kebudayaan telah melakukan bantuan pengadaan alat tenun untuk membudidayakan kebiasaan menenun sarung yang dilakukan oleh perempuan Amma Toa, Pemerintah juga sedang merencanakan pelaksanaan festival budaya sebagai wadah promosi kebudayaan untuk memperkenalkan kebudayaan masyarakat adat Amma Toa ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Dari segi infrastruktur, Pemerintah juga telah menganggarkan pembenahan jalan menuju kawasan adat Amma Toa sebagai program prioritas di periode tahun 2013-2014. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba juga akan mengusahakan usulan

	masyarakat adat Amma Toa Kajang sebagai situs warisan dunia ke UNESCO.
Perbedaan	Perbedaan dengan penelitian yaitu pada tujuan penelitian, dimana peneliti lebih mengkaji tentang upaya dan faktor penghambat pemerintah daerah dalam melestarikan budaya
Persamaan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dan berkaitan dengan pemerintah daerah tentang pelestarian kebudayaan.

Tabel 3. Karmadi. Budaya Lokal Sebagai Warisan Budaya dan Upaya Pelestariannya

Nama	Karmadi
Judul	*Budaya Lokal Sebagai Warisan Budaya dan Upaya Pelestariannya*
Variabel Penelitian	Variabel bebas (*independentt*) adalah budaya lokal.
	Variabel tergantung adalah warisan budaya dan upaya pelestariannya
Metode Penelitian	Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif
Hasil Penelitian	Sinergi ini ternyata membawa hasil positif terhadap nilai budaya dan perubahan sosial masyarakat tengger *sabrang kulon,* serta keberhasilan dalam mengembangkan potensi wisata. Faktor pendukungnya adalah isi peraturan yang mudah dimengerti, sikap aktor pelaksana dalam menerapkan prinsip sinergi dan ketentuan peraturan. Faktor penghambatnya adalah Kapasitas SDM, dan permasalahan area konservasi,otonomi daerah. Masih ada celah dalam melaksanakan sinergi karena tidak terdapat Perda khusus

	yang mengatur masalah pelestarian Kebudayaan Suku Tengger Bromo
Persamaan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dan berkaitan dengan pelestarian kebudayaan.
Perbedaaan	Perbedaan dengan penelitian yaitu pada tujuan penelitian, dimana peneliti lebih mengkaji tentang upaya dan faktor penghambat pemerintah daerah dalam melestarikan budaya

Tabel 4. Ayu Mukhtaromi, *Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan*

Nama	Ayu Mukhtaromi
Judul	*Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan)*
Variabel Penelitian	Variabel bebas (*independentt*) adalah sinergi pemerintah daerah dan lembaga adat.
	Variabel tergantung adalah pelestarian kebudayaan
Metode Penelitian	Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif
Hasil Penelitian	Sinergi ini ternyata membawa hasil positif terhadap nilai budaya dan perubahan sosial masyarakat tengger *sabrang kulon*, serta keberhasilan dalam mengembangkan potensi wisata. Faktor pendukungnya adalah isi peraturan yang mudah dimengerti, sikap aktor pelaksana dalam menerapkan prinsip sinergi dan ketentuan peraturan. Faktor penghambatnya adalah Kapasitas SDM, dan permasalahan area konservasi, otonomi daerah. Masih

	ada celah dalam melaksanakan sinergi karena tidak terdapat Perda khusus yang mengatur masalah pelestarian Kebudayaan Suku Tengger Bromo
Persamaan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada jenis penelitian yaitu sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dan berkaitan dengan pelestarian kebudayaan.
Perbedaaan	Perbedaan dengan penelitian yaitu pada tujuan penelitian, dimana peneliti lebih mengkaji tentang upaya dan faktor penghambat pemerintah daerah dalam melestarikan budaya.

Dari tabel 2.1 yang ada di atas menjelaskan tentang pelelstarian budaya yang dimana dalam penelitian tersebut menggunakan metode yang berbeda-beda. persamaan yaitu sama-sama bertujuan ingin mengetahui sejauh mana peran pemerintah daerah dalam melestarikannn budaya dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan Perbedaan dengan penelitin yang peneliti lakukan waktu, tempat, metode yang digunakan dan fokus penelitian dimana hasil serta hasil penelitian yang tidak sama.

2.2 Konsep Arus Globalisasi

Kata globalisasi dipopulerkan oleh Theodore Lavitte 2007. Istilah itu menunjukan pada sebuah proses tumbuhnya kesadaran global bahwa dunia adalah sebuah lingkungan yang terbangun secara utuh. Di Perancis, kata itu disebut dengan "*Mondialisation*". Di Spanyol dan Amerika Serikat disebut "*Globalizacion*". Globalisasi berasal dari kata *globe* dan *ization*. Globe diartikan sebagai bola bumi atau peta bumi yang bulat. Kata globe kemudian berubah menjadi global. Artinya, secara umum dan keseluruhan, secara bulat atau

bersangkut paut mengenai dan meliputi seluruh dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi berasal dari kata "global" yang berarti meliputi seluruh dunia.

Salah satu penyebab terjadinya globalisasi adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi, seperti teknologi media cetak dan media elektronik. Media elektronik dapat menembus ruang dan waktu dan fakta informasi yang terjadi di suatu negara dapat diakses oleh negara lain yang beribu-ribu kilometer jaraknya dalam waktu yang sama. Selengkapnya. faktor-faktor penyebab globalisasi adalah:

1. Adanya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga menjamin kemudahan terlaksananya transaksi ekonomi antarnegara.
2. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi transportasi sehingga memudahkan transfer barang dan jasa antarnegara.
3. Adanya kemajuan kerja sama ekonomi internasional yang semakin erat sehingga memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antar negara

2.3 Konsep Kebijakan

2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan,

organisasi); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut William N Dunn (2003) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Edward (2005) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli dan memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit

7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2012), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada "kebijakan luar negeri Indonesia" , "kebijakan ekonomi Jepang", dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.

Menurut Padmuji (2009) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya. James E Anderson sebagaimana mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *"apurposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or*

matter of concern" (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2012) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Rose sebagaimana dikutip juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.3.2 Urgensi Kebijakan Publik

Menurut Padmuji (2009), menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

1. Alasan Ilmiah

   Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang asal-muasalnya, dengan proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat.

2. Alasan professional

   Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

3. Alasan Politik

   Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

2.3.3 Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

1. Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akanm dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.

2. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kabijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan di pengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan.
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Stretegi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis.

2.3.4 Jenis Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan substantif versus kebijakan procedural, kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh

pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

2. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan *redistributive,* kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
3. Kebijakan materal versus kebijakan simbolik, kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
4. Kebijakan yang barhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*), kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Menurut Suharno (2010) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:

1. Tuntutan kebijakan (*policy demands*), yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh actor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.
2. Keputusan kebijakan (*policy decisions*), adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.
3. Pernyataan kebijakan (*policy statements*), ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradialn, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Keluaran kebijakan (*policy outputs*), merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan

dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

5. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*), adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Menurut William Dunn (2003) membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

1. Masalah kebijakan (*policy public*), adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan public. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.
2. Alternative kebijakan (*policy alternatives*), yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat member sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.
3. Tindakan kebijakan (*policy actions*), adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

4. Hasil kebijakan (*policy outcomes*), adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.
5. Hasil guna kebijakan, adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberiakn sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataanya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.

2.4 Konsep Upaya Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Budaya

Dalam kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya yaitu sebagai berikut:

1. Upaya memiliki konotasi negatif yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah.
2. Dalam lingkup pendidikan masalah yang dimaksud adalah berbagai hal yang dapat menghambat perkembangan yang terkait dengan upaya tersebut.

3. Upaya yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak yang baik.
4. Upaya adalah bertujuan untuk membimbing subjek kembali kepada jalur yang semula.
5. Upaya adalah berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian subjek dan lingkungannya .

Pelestarian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI offline, QT Media, 2014) berasal dari kata dasar *lestari*, yang artinya adalah tetap selama-lamanya tidak berubah. Kemudian, dalam kaidah penggunaan Bahasa Indonesia, pengunaan awalan pe- dan akhiran –an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jadi berdasarkan kata kunci *lestari* ditambah awalan pe- dan akhiranan, maka yang dimaksud pelestarian adalah upaya atau proses untuk membuat sesuatu tetap selama-lamanya tidak berubah. Bisa pula didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan sesuatu supaya tetap sebagaimana adanya.

Merujuk pada definisi pelestarian dalam Kamus Bahasa Indonesia diatas, maka saya mendefinisikan bahwa yang dimaksud pelestarian budaya (ataupun budaya lokal) adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya budaya tetap sebagaimana adanya. Ketentuan dalam pelestarian budaya akan adanya wujud budaya, dimana artinya bahwa budaya yang dilestarikan memang masih ada dan diketahui, walaupun pada perkembangannya semakin terkisis atau dilupakan. Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda yang dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan budaya itu tak

lagi digunakan maka budaya itu akan hilang. Kapan alat-alat itu tidak lagi digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan hilang.

Mengenai pelestarian budaya lokal, bahwa pelestarian Norma lama bangsa (Budaya lokal) adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah juga untuk melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Mengenai revitalisasi budaya Alwasilah mengatakan adanya tiga langkah, yaitu:

(1) Pemahaman untuk menimbulkan kesadaran,

(2) Perencanaan secara kolektif, dan

(2) Pembangkitan kreatifitas kebudayaaan.

Pelestarian adalah sebuah upaya yang berdasar, dan dasar ini disebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang dilestarikan. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan pelestarian mengenal strategi atapun teknik yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Pelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan dengan perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup. Kelestarian merupakan aspek stabilisasi kehidupan manusia, sedangkan kelangsungan hidup merupakan percerminan dinamika.

Menurut Taylor (2009), pelestarian kebudayaan dilukiskan secara fungsionil, yaitu sebagai suatu relasi terhadap rencana hidup kita sendiri. Kebudayaan lalu nampak sebagai suatu proses belajar raksasa yang sedang

dijalankan oleh umat manusia. Kebudayaan tidak terlaksana diluar kita sendiri, maka kita (manusia) sendirilah yang harus menemukan suatu strategi kebudayaan. Termasuk dalam proses melestarikan kebudayaan. Karena, proses melestarikan kebudayaan itu adalah pada hakekatnya akan mengarah kepada perilaku kebudayaan dengan sendirinya, jika dilakukan secara terus menerus dan dalam kurun waktu tertentu. Pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap.

a. Tujuan Pelestarian

b. Sosialisasi Pemerintah

c. Perhatian masyarakat

2.5 Konsep Kebudayaan

2.5.1 Pengertian Kebudayaan

Menurut Wahyudi Sunjata (2012) kebudayaan adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terkait pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Sementara kebudayaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sekelompok orang memiliki tahapan yang sesuai dengan tujuan acara. kebudayaan merupakan suatu bentuk kebudayaan yang bersifat turun temurun yang dilaksankan secara teratur dan tertib menurut adat kebiasaan masyarakat dalam bentuk suatu rangkaian aktivitas permohonan sebagai ungkapan rasa terimakasih. Selain itu, kebudayaan merupakan perwujudan dari sisem kepercayaan masyarakat yang mempunyai

nilai-nilai Universal, berniali sakral, suci, religius, dilakukan secara turun-temurun serta menjadi kekayaan kebudayaan Nasional.

Jenis kebudayaan dalam kehidupan masyarakat antara lain: kebudayaan penguburan, kebudayaan perkawinan, dan kebudayaan pengukuhan kepala suku. Kebudayaan salah satu cara menelusuri jejak sejarah masyarakat Indonesia pada masa lalu dapat kita jumpai pada kebudayaan-kebudayaan merupakan warisan nenek moyang kita. Selain melalui mitologi dan legenda, cara yang dapat dilakukan untuk mengenal kesadaran sejarah pada masyarakat yang belum mengenal tulisan yaitu melalui kebudayaan. Kebudayaan pada umumnya memiliki nilai sakral oleh masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.

Menurut Suryono Aryono (2002), pelaksanaan kebudayaan termasuk dalam golongan adat yang tidak mempunyai akibat hukum, hanya saja apabila tidak dilakukan oleh masyarakat, maka timbul rasa kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang menimpa dirinya. Kebudayaan adalah suatu kebudayaan yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku disuatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki kebudayaan sendiri-sendiri, seperti kebudayaan perkawinan, kebudayaan labuhan, kebudayaan yang dilakukan didaerah sebenarnya juga tidak terlepas dari unsur sejarah. Hukum adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, berlakunya suatu peraturan hukum adat, tampak dalam penetapan (putusan-putusan) misalnya putusan kepala adat sesuai dengan lapangan kopetensinya masing-masing.

Dari uraian ditas pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan kegiatan yang memiliki nilai yang sakral oleh masyarakt pendukung kebudayaan, atau kebudayaan serangkaian tindakan serta perbuatan yang terikat berdasarkan aturan adat istiadat, Agama dan kepercayaan dari masing-masing daerah dan turun temurun dari nenek moyang untuk menjaga dan melestariakan.

2.5.2 Unsur-unsur Kebudayaan

Unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia. Membagi kebudayaan yang ditemukan pada bangsa didunia dari sistem kebuadayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks sepperti masyarakat perkotaan. yakni suatu metode hidup yang diwarisi dari generasi ke generasi. Unsure yang terbentuk didalam tradisibisa disebut amat rumit dikarenakan terbentuk pada mekanisme agama serta politik, adat istiadat, sandangan, berbahasa, tempat tinggal, karya seni juga dengan. Sehinngga tradisi bersifat rumit, abstrak serta berhubungan yang mengakibatkan dipelajari oleh masyarakat.

Menurut Koentjaningrat (2010) ada beberapa unsur yang terkait dengan pelaksanaan kebudayaan diantaranya adalah:

1. Tempat berlangsungnya kebudayaan, tempat yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebudayaan biasanya adalah tempat kramat atau bersifat sakral/suci, tidak setiap orang dapat mengunjungi tempat itu. Tempat tersebut hanya digunakan oleh orang-orang yang

berkepentingan saja, dalam hal ini adalah orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebudayaan seperti pemimpin kebudayaan.

2. Saat berlangsungnya kebudayaan/waktu pelaksanaan kebudayaan
3. Waktu pelaksanaan kebudayaan adalah saat-saat tertentu yang dirasakan tepat untuk melangsungkan kebudayaan. Dalam kebudayaan rutin yang diselenggarakan tiap tahun biasanya ada patokan dari waktu pelaksanaan kebudayaan yang lampau.
4. Benda-benda atau alat dalam kebudayaan
5. Benda-benda atau alat dalam pelaksanaan kebudayaan adalah sesuatu yang harus ada macam sesaji yang berfungsi sebagai alat dalam pelaksanaan kebudayaan tersebut.
6. Orang-orang yang terlibat di dalamnya, orang-orang yang terlibat di dalamnya pelaksanaan kebudayaan adalah mereka yang bertindak sebagai pemimpin jalannya kebudayaan dan beberapa orang yang paham dalam ritual kebudayaan.

Unsur-unsur di dalamnya merupakan kewajiban, oleh karena itu dalam setiap melaksanakan kebudayaan, keempat unsur di atas harus disertakan. Dalam unsur-unsur tersebut, terdapat unsur perbuatan yang terkait dengan pelaksanaan kebudayaan.

Sedangkan menurut Ihromi (2004) unsur-unsur dalam kebudayaan meliputi: tempat kebudayaan, waktu pelaksanaan, benda-benda/peralatan dan pelaku kebudayaan yang meliputi pemimpin dan peserta kebudayaan. Rangkaian kegiatan di atas merupakan unsur pokok kebudayaan. Oleh karena itu, pada saat

kebudayaan kebudayaanonal dilangsungkan akan terdiri dari beberapa rangkaian kebudayaan yang telah disebutkan di atas. Namun tidak semua kegiatan secara terperinci dilakukan pada pelaksanaan kebudayaan kebudayaanoanal. Ada yang terdiri dari semua kegiatan yang telah disebutkan di atas tetapi adapula hal yang hanya melakukan beberapa dari kegiatan tersebut karena disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan kebudayaan kebudayaan.

Dari beberapa unsur kebudayaan telah dijabarkan di atas dapat dikatakan bahwa unsur kebudayaan yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam berdasarkan perbuatan dari kekhasan yang ada di masing-masing daerah. Selain memiliki ciri khas juga memiliki makna-makna tersendiri dalam hal adat istiadat. Hal ini bercermin dalam setiap sikap dan tindakan dari masyarakat yang mendiami daerah tertentu, berdasarkan kebiasaan yang ada dengan tidak melupakan hukum dan norma.

2.5.3 Tujuan Kebudayaan

Tujuan penyelenggarakan kebudayaan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta para leluhur yang telah melimpahkan karunianya. Pelaksanaan kebudayaan dilakukan sebagai wujud penghormatan atas budaya warisan nenek moyang yang turun temurun harus dilestarikan. Tanpa adanya usaha pelestarian dari masyarkat, maka budaya nenek moyang yang berupa kebudayaan itu akan punah dan tinggal cerita. Sangat disayangkan apabila hal ini terjadi mengingat di Zaman sekarang negeri ini mengalami krisis moral yang sebenarnya dapat dicegah dengan pelestarian kebudayaan ada.

Pelaksanaan kebudayaan dapat memupuk rasa persaudaraan dan menumbuhkan nilai-nilai luhur yang penting bagi masyarakat dan bangas Indonesia. Tujuan umum dari kebudayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang berbudi pekerti luhur. Secara khusus, kebudayaan dilakukan sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kepada yang ghaib. Adanya rasa cinta, hormat, dan bakti adalah pendorong bagi manusia untuk melakukan berbagai perbuatan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia ghaib. Kebudayaan dimaksudkan untuk mencapai kehidupan yang tentram dan sejahtera, diberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup. Selain itu, kebudayaan yang dimaksudkan menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, dijauhkan dari malapetaka yang dikhawatirkan akan menimpa masyarakat apabila tidak dilaksanakan. (Koentjaraningrat, 2010).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan dalam masyarakat modern, ketika seseorang berada dalam lingkungannya maka mereka akan mengikuti adat yang berlaku dalam lingkungan tersebut, dan tidak berani meninggalkan kebudayaan itu walaupun sudah mempunyai agama dan kepercayaan sendiri-sendiri.

2.5.4 Bentuk-bentuk Nilai Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat (2010) dalam suatu kebudayaan pada umumnya terdapat nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut.

1. Nilai religius magis

   Religius magis hidup dalam kesukuan masyarakat. Nilai tersebut mempengaruhi dan akhirnya menjadi kebudayaan yang hidup subur dan

kekal dalam kehidupan masyarakat. Masalah asal mula dan inti dari suatu unsur universal seperti religi tegasnya masalah mengapakah manusia percaya kepada suatu kekuatan yang dianggap lebih tinggi dari padanya, dan masalah mengapakah manusia melakukan berbagai hal dengan cara-cara yang beraneka ragam untuk mencari hubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

2. Nilai gotong royong

Dalam masyarakat yang berbentuk komuniti kecil sering tampak seolaholah adanya suatu rasa saling tolong menolong yang besar, sehingga seluruh kehidupan masyarakat itu rupanya berdasarkan rasa yang besar, sehingga seluruh kehidupan masyarakat masyarakat itu rupanya, berdasarkan rasa yang terkandung dalam jiwa para warganya itu.

3. Nilai seni

Dalam upacar ritual, terdapat suatu kesenian yang diuraikan dalam salah satu wujud rasa budaya manusia ialah alam seni. Alam seni ini terdiri beberapa unsur, yaitu: seni rupa, seni sastra, seni musik, dan seni drama. Alam seni merupakan aktivitas tingkah laku yang berpola pada manusia yang dalam mengungkapkannya penuh dengan tindakan-tindakan simbolis.

4. Nilai *mistisme*

Islam merupakan konsep ajaran agama yang humanis, yaitu agama yang mementingkan manusia sebagai tujuan sentral dengan mendasarkan

pada konsep *"humanisme theosentrik"* yaitu poros islam adalah ajaran Tauhid yang diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan kehidupan dan peradaban umat manusia.

2.6 Konsep *Rimpu mpida* (Busana Adat)

Rimpu mpida merupakan busana adat harian tradisional yang berkembang pada masa kesultanan, sebagai identitas bagi wanita muslimah di Bima. *Rimpu mpida* mulai populer sejak berdirinya Negara Islam di Bima pada 15 Rabiul awal 1050 H bertepatan dengan 5 Juli 1640 (Anwar, 2010). *Rimpu mpida* adalah memakai sarung dengan melingkarkannya pada kepala dimana yang terlihat hanya wajah dengan menggunakan sarung. kebudayaan *Rimpu mpida* yang merupakan salah satu hasil kebudayaan masyarakat Bima. Umumnya, kaum perempuan memakai *rimpu mpida* untuk menutup auratnya sebagaimana ajaran Islam mengajarkan bahwa setiap kaum perempuan yang sudah aqil balik harus menutup aurat dihadapan orang yang non muhrimnya.

Ada dua jenis *rimpu mpida* yang biasanya dikenakan. Pertama adalah *Rimpu Mpida* atau tutup kepala bagi perempuan yang belum menikah. *Rimpu mpida* ini akan menutupi seluruh wajah kecuali bagian mata saja sampai bawa lutut kaki dann sarung yang digunakan yaitu sarung adat asli bima. Kemudian bagi perempuan yang sudah menikah maka menggunakan *Rimpu mpida* yang pada bagian wajahnya terbuka (Malingi, 2013).

Menurut sejarawan Bima, M. Hilir Ismail, keberadaan *rimpu mpida* juga tak lepas dari upaya pemerintah (masa Sultan Nuruddin) untuk memanfaatkan kain sarung atau kain tenun Bima yang sudah lama dikenal bahkan menjadi komoditi

perdagangan dunia yang sangat laris sekitar abad 13 lampau. Sebab, pada masa itu, orang bima (*Dou Mbojo*) memanfaatkan melimpahnya tanaman kapas untuk dijadikan kain tenun yang menjadi komoditi perdagangan yang terjual hingga ke negeri Cina. Sejak saat itu, semua wanita yang sudah akil baliq diwajibkan memakai *rimpu mpida* apabila hendak bepergian meninggalkan rumah dan keluarganya untuk sesuatu urusan. Kalau tidak, berarti sudah melanggar hukum agama dan adat pada saat itu. "Hukumannya lebih kepada hukuman moral. Orang yang melanggar dengan sendirinya akan merasa malu", ujarnya.

Keterangan Hilir diperkuat lagi oleh Nur Farhaty Ghani, dari Forum Perempuan (ForPuan) Bima. Menurutnya, *rimpu mpida* merupakan bagian dari identitas wanita Bima pada masa Islam baru berkembang di Bima. "Zaman dulu, wanita Bima dengan bangga memakai *rimpu mpida* untuk menunjukkan ke khalayak bahwa mereka sudah bisa menenun dan kain yang mereka gunakan adalah hasil karya sendiri" (Anwar, 2010).

2.7 Kerangka Berpikir

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, kontak dan komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya dalam lingkup lokal, akan tetapi sudah mencapai pada lingkup global. Masyarakat di berbagai pedesaan pada khususnya pada saat ini sudah tidak merasa sulit lagi untuk mengakses informasi mengenai unsur-unsur kebudayaan modern yang berasal dari luar. Akan tetapi, masyarakat yang tidak dibekali dengan rasa memiliki terhadap kebudayaan sendiri ketika ada kebudayaan modern dari luar yang masuk dan diterima, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan lebih menyukai kebudayaan luar

dibandingkan dengan kebudayaan sendiri. Dengan adanya difusi kebudayaan modern serta keadaan masyarakat yang global tersebut, tanpa disadari mengubah pola perilaku masyarakat.

Berubahnya pola perilaku masyarakat lambat laun akan berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat tersebut. Ketika kehidupan sosial masyarakat berubah, maka tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan pada kebudayaan lokal. Adanya perubahan sosial yang mempengaruhi kebudayaan dalam masyarakat, tentunya akan mempengaruhi unsur-unsur kebudayaan yang ada. Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Adanya perubahan sosial yang terjadi, mempengaruhi unsure-unsur kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu unsur kebudayaan yang ada di dalam masyarakat Kecamatan Sape Kabupaten Bima yaitu budaya *rimpu mpida* atau di sebut Busana adat. Budaya *rimpu mpida* tersebut mendapat pengaruh dari perubahan sosial, sehingga mempengaruhi keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Ketika keberadaan dari budaya *rimpu mpida* itu mulai tak terlihat, maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat.

Tabel 2.7. Kerangka Berfikir Peneliti

Indikator-Indikator		Aspek-Aspek Pelestarian
▪ **Pendukung** 1. Arus Globalisasi 2. Arus Kebijakan 3. Keadaan Masyarakata ▪ **Penghambat** 1. Ketersediaan Anggaran 2.Ketersediaan sarana dan prasarana 3. Peran serta masyarakat		1. Tujuan Pelestarian 2. Sosialisasi Pemerintah 3. Perhatian masyarakat

2.8 Definisi konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang di jadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoprasikannya di lapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknaknya masi sanggat abstrak walaupun secara intuitif masih bias di pahami maksudnya.

Dengan demikian untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menentukan dan memilih teori yang di gunakan dalam penelitian ini serta sesuai dengan isi dari kerangka teori peneliti. Maka beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apayang akan diteliti dalam proposal ini antara lain:

2.9 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kita tentang bagaimana Cara untuk mengukur variable. Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variable. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang Sama. Karena berdasarkan informasi itu, kita dapat mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang di bangun berdasarkan konsep yang Sama. Dengan demikian kita dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang Sama atau di perlukan penngukuran yang baru.

2.9.1 Aspek-Aspek Pelestarian

1. Tujuan Pelestarian
2. Sosialisasi Pemerintah
3. Perhatian masyarakat

2.9.2 Faktor-Faktor pendukung dan penghambat

- Pendukung
    1. Arus globalisasi
    2. Arah Kebijakan
    3. Keadaan masyarakat
- Penghambat

1. Kesediaan anggaran

2. Kesediaan Sarana dan Prasarana

3. Peran serta masysarakat

Dari berbagai faktor-faktor dan aspek di atas dapat di simpulkan bahwa di dalam suatu penelitian sangatlah penting definisi operasional yaitu dapat memberikan informasi kita tentang bagaimana Cara untuk mengukur variabele. Definisi opeasional juga temasuk suatu definisi yang di dasarkan pada karakteristik yang dapat di ovservasi dari sedang apa dari apa yang sedang di identiikasi atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan data.

2.10 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu di tegaskan. Sesuai dengaan judul yang penulis angkat, oleh karena peneliti ingin berfokus untuk mengamati dan meneliti upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melestarikan budaya rimpu mpida di Kabupaten Bima tahun 2019 untuk mengetahui bagaimana upaya pelestarian budaya itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa analisis angka-angka statistik, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Menurut Moleong (2006) menulis bahwa "penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsikan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada".

Selanjutnya, masih menurut Moleong (2006) yang menyatakan bahwa "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kontek khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah". Dengan metode penelitian ini penulis merasakan cukup memudahkan dalam melaksanakan penelitian dikarenakan data yang dikumpulkan penulis bukan merupakan data analisis angka-angka statistik.

Terakhir menurut Soehartono (2008), penelitian Kualitatif yaitu "penelitian yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses, latar belakang alami (*natural setting*) dan digunakan sebagi sumber data langsung dari

peneliti sendiri sebagai instrumen kunci". Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berhubungan dengan tingkat pelayanan aparatur pemerintah DPM & PTSP, serta kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayaan perizinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian kualitatif ini tidak hanya mengungkapkan peristiwa riil, tetapi lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi. Selain itu penelitian ini akan lebih peka terhadap informasi yang bersifat kualitatif deskriptif dengan secara relatif berusaha mempertahankan keutuhan dari objek yang diteliti.

Menurut Sudjana (2005) "Penelitian deskriptif yaitu sekedar untuk melukiskan atau menggambarkan (*deskripsi*) sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti". Lebih lanjut Sudjana (2005) menjelaskan bahwa "penelitian deskriptif dimaksudkan untuk explorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti".

Dengan demikian melalui jenis penelitian ini, maka dapat di jelaskan secara terperinci sehingga hasil akhirnya bisa memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan untuk merumuskan kembali sekaligus sebagai penyempurna suatu kebijakan untuk merumuskan kembali sekaligus penyempurna suatu kebijakan yang di ambil dan di implementasikan.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu Kantor Dinas Penelitian ini di laksanakan pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bima dengan alamat Jalan Lintas Sumbawa-Mataram. Peneliti tertarik pada Kantor Dinas Penelitian ini di

laksanakan pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bima dengan alamat Jalan Lintas Sumbawa-Mataram sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Penelitian ini di laksanakan pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bima dengan alamat Jalan Lintas Sumbawa-Mataram merupakan ujung tombak terdepan dalam melestarikan budaya *rimpu mpida* di Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti dalam mengoleksi data melakukan kontak langsung dan berhubungan secara kontinyu dengan informan dan dalam *setting* yang wajar. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti secara langsung atau sebagai instrumen pertama dalam mengumpulkan dan menginterprentasikan data.

3.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini pihak yang di jadikan sumber data adalah adalah kepala bidang data, kesiapan program, sekertaris yang di anggap mempunyai informasi kunci yang di gunakan.

3.3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara lansung dari sumbernya, melalui observasi dan wawancara dengan sumber informasi atau narasumber yang terpilih, kemudian hasil observasi di cek kebenaraannya dengan sumber data lain (data sekunder)

3.3.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak di peroleh secara lansung dari sumbernya, tetapi melalui dokumen-dokumen atau catatan tertulis. Data yang tertulis bersumber dari dokumen sehingga disebut data documentar, yaitu data atau gambaran tentang lokasi penelitian yang meliputi sebagai berikut: keadaan geografi, demografi, ekonomi dan sosial budaya serta keadaan tata Pemerintahan Daerah dan Dinas Kependudukan dan Catatan sipilbaik data statis maupun data dinamis.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian Kualitatif, peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor konsektual. Sehingga dapat menjaring sebanyak mungkin informasi atau data dari berbagai sumber yang ada. Tujuannya adalah merinci kekhususan yang ditemukan kedalam kontek yang ada, dan menggali informasi sebnyak munkin dari informan untuk dipergunakan sebagai dasar dari rancangan dan teori yang muncul.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling* atau teknik bola salju. Menurut Sudjana (2005) menyatakan bahwa "Penelitian yang menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu penelitian tanpa rencana, mengorek informasi kepada informan satu yang kemudian menunjukkan informan kedua dan demikian juga dengan informan kedua menunjukkan informan ketiga terus sampai dirasa informasi yang diperoleh lengkap dan mendalam". *Snowball Sampling* ini dilakukan untuk melengkapi informasi yang ada sehingga dalam

proses pengumpulan data, peneliti tidak membatasi jumlah informan dan lebih memilih informan yang mengetahui masalah secara mendetil.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bima, Kasi pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bima, dan masyarakat Kecamatan Sape Kabupaten Bima, serta informan lain yang di anggap mempunyai hasil mendetil.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ada tiga teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi:

1. Observasi

   Teknik pengumpulan data melalui Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap upaya pemerintah daerah dalam melestarikan budaya *rimpu mpida* di Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Observasi yang dilakukan dengancara peneliti mengamati upaya pemerintah daerah dalam melestarikan budaya *rimpu mpida* di Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

2. Wawancara

   Dalam penelitian ini juga di lakukan wawancara lansung adalah proses interaksi antara peneliti dengan informan atau responden guna memperoleh data atau informasi untuk kepentingan tertentu". Untuk memperoleh data dan informasi wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bima, Kasi pada Dinas Pendidikan

Kebudayaan Kabupaten Bima, dan masyarakat Kecamatan Sape Kabupaten Bima, serta informan lain yang di anggap mempunyai hasil mendetil. Wawancara ini dilakukan pada saat hari kerja.

3. Dokumentasi

Dokumen yaitu data-data yang bersumber dari non manusia, merupakan sesuatau yang sudah ada." Untuk memperoleh data-data yang diperlukandalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini ,baik dipustka maupun di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bima, seperti buku jurnal, surat kabar, peraturan pemerintah dan, lain sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2006) analilis data yaitu: upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yeng dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Dengan demikian, data yang telah dikumpukan dari hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi akan di analisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung dari hasil wawancara.

Secara persial prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunanakan model analisis data dari Milles dan Huberman (2000) dalam Sudjana (2005), yaitu analisis interaktif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key informan* yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung kelapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapat sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi Data yaitu proses pemilihan proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dilapangan selama penelitian tujuan diadakan transkip data (tansformasi data) untuk memilih transformasi data yang sesuai dengan masalah yang terjadi pusat penelitian lapangan.
3. Penyajian data (*data display)* yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif dan tabel yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel atau uraian penjelasan. Penyajian data atau *display* data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
4. Menarik Kesimpulan (verifikasi) yaitu mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Verifikasi dalam data penelitian kulitatif ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung sejak awal memasuki lapangan

dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar data yang diperoleh dijamin keabsahannya sehingga dapat dipertanggung jawabkan hasil penelitiannya, maka perlu melakukan triangulasi. Menurut Moleong (2006) "Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai penanding untuk data itu". Menurut Danzim dalam Moleong (2006) membedakan "empat macam Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori".

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi dengan penggunaan sumber. Menurut Patton dalam Moleong (2006) menyebutkan bahwa triangulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek balik erajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang membedakan dalam penelitian kualitatif". Pengecekan keabsahan data dengan sumber menurut Moleong (2006) dapat diketahui dengan cara:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dan apa yang dikatakan orang secara pribadi
c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu

d. Membandingkan keadaan dengan persfektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Dalam penelitian ini untuk mengecek keabsahan data, peneliti lebih memfokuskan kepada membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti dalam ppenelitian yang dilakukan secara lansung di lapangan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN